



REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2023 - 2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengan Kec.
Barabai Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281
E-mail : diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id
B A R A B A I

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050 /27 / DISKOMINFO / TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REVIU PERUBAHAN KE DUA
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023 - 2026**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk TIM REVIU Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026;
- Mengingat :**
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 6 Februari 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk TIM REVIU Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :
1. Menyusun agenda kerja TIM REVIU Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026;
 2. Mengumpulkan bahan-bahan, data dan informasi kebutuhan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026;
 3. Perumusan isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 4. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah;
 5. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 6. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026.
 7. Melakukan penyusunan Rancangan Awal hingga Rancangan Akhir Renstra Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2026.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023 cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Diskominfo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 19 Oktober 2023

Kepala Dinas

Ir. H. AHMAD SYAHRIANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660518 199303 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO

HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 050 / 27 /DISKOMINFO/2023

TANGGAL : 19 Oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REVIU
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DISKOMINFO
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2023 – 2026

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Diskominfo	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kabid Informatika & Persandian	Anggota
4	Kabid Komunikasi & informasi Publik	Anggota
5	Kasubag Keuangan	Anggota

Kepala Dinas

Ir. H. AHMAD SYAHRIANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660518 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengan Kec. Barabai

Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281

E-mail : diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id

BARABAI

71315

Kode Pos

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NOMOR : 050/ 28 / DISKOMINFO/ 2023

**TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2023-2026**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setelah ditetapkannya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) maka seluruh SKPD wajib menyusun Rencana Strategis SKPD;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026 maka perlu adanya penyesuaian sasaran dan indikator serta target kinerja;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 141 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta indikator dan target.

- KETIGA : Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023-2026 merupakan landasan bagi unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Review Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2023-2026 merupakan bahan acuan dalam evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 20 Oktober 2023

Kepala Dinas

Ir. H. AHMAD SYAHRANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660518 199303 1 006

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2026 merupakan bagian integral dari program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika selama 5 (lima) tahun. Dalam perkembangannya perlu diadakan reviu terhadap Renstra sesuai dengan keadaan dan prediksi – prediksi yang akan terjadi.

Penyusunan reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, disiapkan guna merespon dan mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal. Perubahan lingkungan strategis tersebut diprediksi akan melatar belakangi beberapa perubahan skema – skema perencanaan dalam bentuk rencana kerja dan rencana anggaran pembangunan yang disusun berdasarkan penganggaran terpadu (unified budget) menurut klasifikasi organisasi, fungsi dan jenis belanja serta penyusunan program kerja yang berkesinambungan (sustainable program) berbasis kinerja.

Secara rinci reviu RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 berisi kemajuan yang telah dicapai serta masalah dan tantangan akan dihadapi pada masing-masing bidang di lingkungannya. Dari perkembangan keadaan tersebut kemudian dirumuskan sasaran pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang hendak dicapai serta prioritas pembangunan yang akan ditempuh dengan mengacu pada agenda pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Demikian penyusunan Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika, semoga bermanfaat.

Barabai, 20 Oktober 2023

Kepala Dinas

Ir. H. AHMAD SYAHRANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660518 199303 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan.	6
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.	10
2.2 Sumberdaya	15
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	37
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	38
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.	40
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi.	42
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	43
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	46
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika.	48
BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
Startegi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika.	50
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika	54

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026.	
.....	65

BAB. VIII PENUTUP	
-------------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya manusia Dinas Komunikasi dan Informatika	15
Tabel 2.2 Sarana Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika.....	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	33
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika	34
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	38
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan PD berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	42
Tabel 3.4 Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pembangunan Komunikasi dan Informatika.....	44
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Analisis KLHS(TPB)	45
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026	49
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026	52
Tabel 6.1 Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026	56
Tabel 6.2 Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026.....	60
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021 - 2026	65

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Logic Frame Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
Lampiran 2
Pohon Kinerja Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi , agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *goodgovernance*.

Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah , dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antarlain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek insfrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi, statistik dan

persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e- government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Bupati Hulu Sungai Tengah terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program- program Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sunai Tengah dalam menyusun rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan

Pedoman Pengelolaan -Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 serta Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2024, dalam perkembangannya perlu dilakukan **review** terhadap Renstra sesuai dengan keadaan dan prediksi-prediksi yang akan terjadi.

1.2 Landasan Hukum

Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
 9. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
 10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika ;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024;
 19. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
 20. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
 21. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;

22. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik tahun 2020-2024
23. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara tahun 2020-2024
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016-2036 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026;
29. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Riview Renstra Perangkat Daerah ini, dimaksudkan untuk menyediakan penyesuaian tolok ukur pelaksanaan strategi pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai bagian penjabaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi dalam rangka menjalankan visi dan misi Kepala Daerah sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Daerah pada setiap Akhir Tahun Anggaran dan Akhir Masa Jabatan.

Tujuan Penyusunan Riview renstra Perangkat Daerah ini adalah :

1. Menjadikan kerangka dasar dalam upaya memantapkan terselenggaranya kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatika dalam turut mendukung pencapaian sasaran Renstra Kementerian, Renstra Propvinsi dan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
2. Memberi pedoman untuk pembuatan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah;

3. Mempermudah pelaksanaan evaluasi, penyusunan serta penyampaian laporan kinerja yang terukur;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
5. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam rentang tahun 2021-2026

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Riview Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Komunikasi dan Informatia KabupatenHulu Sungai Tengah 2021-2026 dibuat dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB.I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/Kabupaten, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan PerangkatDaerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunanRenstra Perangkat Daerah

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra PerangkatDaerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB.II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan InformatikaKabupatenHulu Sungai Tengah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan- hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme);

2.2 Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas komunikasi dan Informatika

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah Tengah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs (Millenium Development Goals) atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Komunikasi dan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Renstra Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada

lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan;

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika,

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Tengah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika ataupun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah ditinjau dari

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah,
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian,
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi
4. implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dikemukakan dalam metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut, dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta Indikator Kinerjanya.

BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam lima tahun mendatang.

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB, VIII PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

8.2 Kaedah Pelaksanaan

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

1. Tugas Pokok dan Fungsi

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas

Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas komunikasi dan Informatika, pasal 4 ayat 1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1) menyelenggarakan Fungsi:

- 1) pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 2) penyelenggaraan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 3) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- 4) penyelenggaraan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis; dan
- 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

1) Tugas Pokok

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan Dinas dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.

2) Fungsi

- a) Pengorganisasian penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b) Pengoordinasian dalam penyusunan perencanaan Dinas;
- c) Pengoordinasian Penatausahaan urusan keuangan;
- d) Pengoordinasian Penatausahaan urusan umum dan kepegawaian;

- e) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi di lingkup Dinas.
 - f) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas dan fungsi Sekretariat;
 - g) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaantugas dan fungsi Dinas; dan
 - h) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh KepalaDinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
- 1) Tugas Pokok
- Bidang Komunikasi dan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidangkemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik.
- 2) Fungsi
- a) Pengoordinasian Penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b) Pengoordinasian Penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;
 - c) Pengoordinasian Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kemitraan dan perijinan komunikasi publik, media informasi publik, serta statistik;
 - d) Pengoordinasian Pengelolaan kemitraan dan perijinan komunikasi publik;
 - e) Pengoordinasian Pengelolaan media informasi publik;
 - f) Pengoordinasian Pelayanan informasi publik;
 - g) Pengoordinasian Pengelolaan statistic sektoral;
 - h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas danfungsi Bidang;
 - i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuaidengan tugas dan fungsinya.
- d. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Informatika dan Persandian
- 1) Tugas Pokok

Bidang Informatika dan Persandian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E- Government, serta keamanan informasi, dan persandian.

2) Fungsi

- a) Pengoordinasian Penyusunan rencana kerja Bidang;
- b) Pengoordinasian penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian;
- c) Pengoordinasian penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan sarana dan aplikasi informatika, pengembangan E-Government, serta keamanan informasi, dan persandian;
- d) Pengoordinasian pengembangan sarana dan aplikasi informatika;
- e) Pengoordinasian pengembangan E-Government;
- f) Pengoordinasian pengembangan keamanan informasi dan persandian;
- g) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang;
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Struktur Organisasi

Struktur dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdiri dari yakni sebagai berikut :

a. Kepala PD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan eselon II.b, Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Kepada Bupati melaluisekretaris Daerah.

b. Sekretaris

Sekretaris Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan eselon III.A, membawahi 2 (dua) sub bagian yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian (eselon IV,a) sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang-bidang

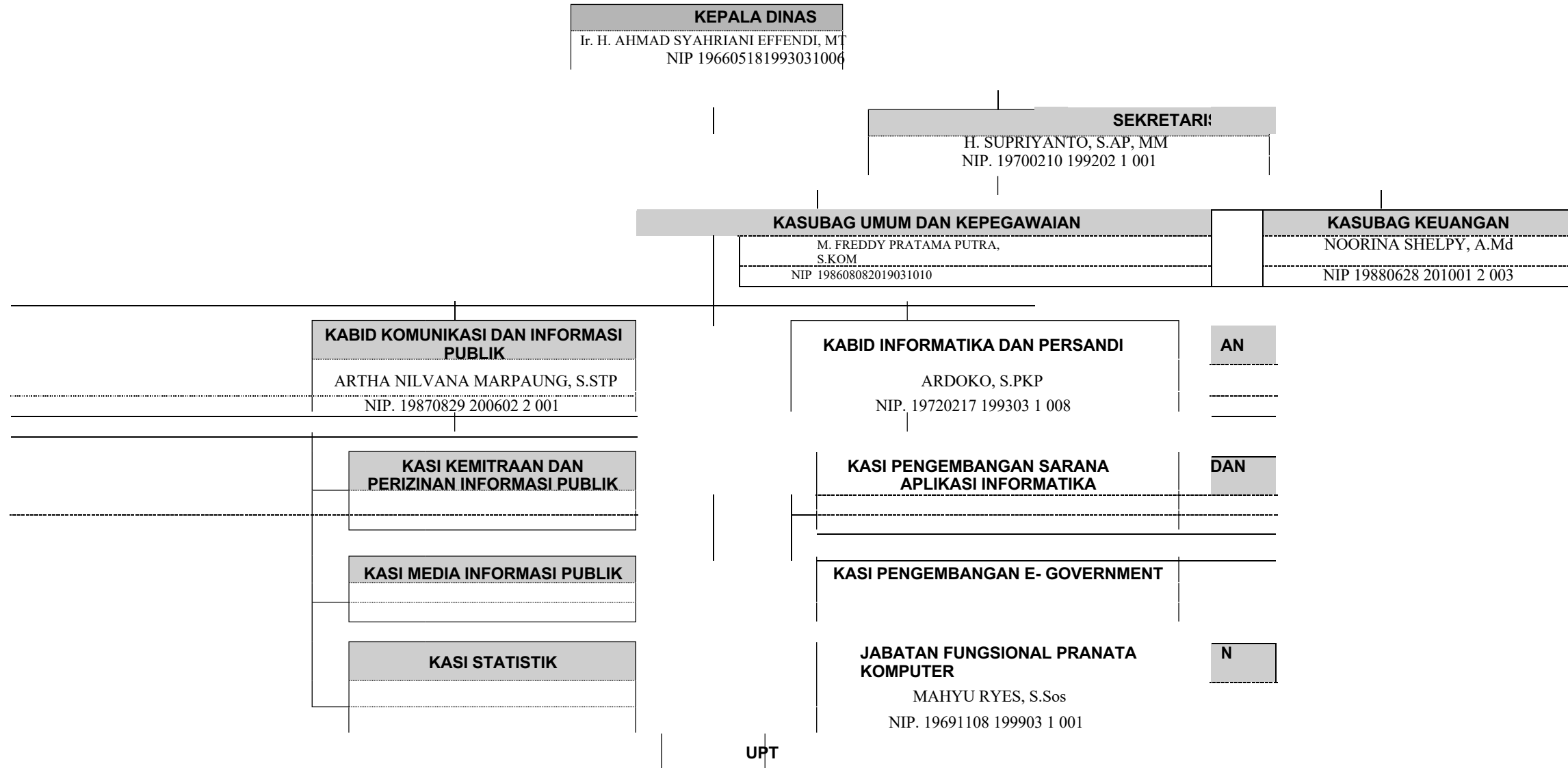
Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat 2 (dua) bidang yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dengan eselon III.B dan membawahi beberapa seksi yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dengan eselon IV.A yaitu :

- 1) Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, membawahkan 3 (tiga) seksi
 - a) Seksi kemitraan dan Perijinan Komunikasi Publik
 - b) Seksi Media Informasi Publik
 - c) Seksi Statistik
 - 2) Bidang Informatika dan Persendian, membawahkan 3 (tiga) seksi
 - a) Seksi Pengembangan Sarana dan Aplikasi Informatika
 - b) Seksi Pengembangan E Government
 - c) Seksi Keamanan Informasi, dan Persendian
- d. Unit Pelayanan Teknis
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NOMOR : 45 TAHUN 2016
TANGAL : 25 NOPEMBER 2016



2.2 Sumberdaya

Tabel 2.1 SUMBERDAYA
MANUSIA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. HULUSUNGAITENGAH

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		S.3	S.2	S.1 / D.IV	SM / D.III	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Bagian Sekretariat	-	1	1	2	1	-	-	5
3	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	-	-	3	-	-	-	-	3
4	Bidang Informatika dan Persandian	-	-	3	1	-	-	-	4
7	Jabatan Fungsional (Jafung)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	C P N S	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Tenaga Kontrak	-	-	4	1	3	-	-	8
	JUMLAH	-	2	11	5	4	-	-	21

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin :

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	15	71,42
2.	Perempuan	6	28,57
	JUMLAH	21	

3. Komposisi Berdasarkan yang Mengikuti Pelatihan Penjenjangan :

NO	Jenis Penjenjangan	Jumlah	%
1	DIKLAT PIM II	0	0
2	DIKLAT PIM III	0	0
3	DIKLAT PIM IV	2	15,38
	JUMLAH	2	15,38

4. Komposisi Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan :

NO	Pangkat / Golongan	Jumlah	%
3	Golongan IV/b	1	7,69
2	Golongan IV/a	2	15,38
4	Golongan III/d	3	23,07
5	Golongan III/c	-	-
6	Golongan III/b	-	-
7	Golongan III/a	4	30,37
8	Golongan II/d	1	7,69
9	Golongan II/c	2	15,38
10	Golongan II/b	-	-
11	Golongan II/a	-	-
	JUMLAH	13	

5. Komposisi SDM Berdasarkan Kualifikasi Keahlian :

NO	Jenis pendidikan/keahlian	Jumlah SDM yang diperlukan	SDM yang ada
1	Operator Jaringan Mikrotik	2	1
2	Operator Website	1	1
3	Operator Videotron	1	1
4	Operator/Pengelola Server	1	1
5	Teknisi Radio Siaran	1	-
6	Teknisi Radio Repeter/UHF	-	-
7	Penyusun Program Siaran	1	-
8	Penerjemah Bahasa	-	-
9	Pranata Komputer	4	1
10	Programer	3	1
11	Statistik	2	1
JUMLAH		21	7

Tabel. 2.2 SARANA
dan PRASARANA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

No	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah Barang	Merk/ Type	Tahun Pembelian	Asal usul	Harga	Keterangan
1	Mobil Jeep	1	Suzuki/SJ140 Katana	2006	Pembelian	107.000,000,-	
2	Mobil Mini Bus	1	Toyota / New Kijang Innova	2014	Pembelian	295.385,000,-	
3	Sepeda Motor	1	Suzuki	2008	Pembelian	15.500,000,-	
4	Sepeda Motor	1	Suzuki Thunder	2011	Pembelian	16.977,500,-	
5	Solder Listrik	1	Dekkon / Presto 938N	2018	Pembelian	230.000,-	
6	Mesin Bor Kayu	1	Mactec /MT 80R	2018	Pembelian	1.040.000,-	
7	ILS.Calibration RX.	1	GARMIN / GPSMAP.64s	2019	pembelian	4.834.800,-	
8	Scanner (Universal Tester)	1	BROTHER / ADS-1200	2019	Pembelian	5.063.000,-	
9	Lemari Besi/Metal	2	FRONTLINE	2019	Pembelian	7.112.800,-	
10	Rak Besi	1	Indorack / IR9020G	2014	Pembelian	9.039.948,-	Rak Server
11	Rak Besi	1	-	2019	Pembelian	2.058.400,-	Rak Koran
12	Filing Cabinet Besi	1	Secure Line	2011	Pembelian	10.656.867,-	
13	Filing Cabinet Besi	1	Brother / besi/metal	2018	Pembelian	3.492.500,-	
14	Filing Cabinet Besi	4	FRONTLINE	2019	Pembelian	14.445.600,-	Filling Cabinet
15	Alat Penghancur Kertas	4	HSM / HSM Classic 80.2	2019	Pembelian	10.938.600,-	
16	Mesin Absensi	1	Solutio / X601	2017	Pembelian	4.489.100,-	

17	LCD Projector/Infocus	2	Epson / EB-X450	2020	Pembelian	15.290.000,-	
18	Papan Nama Instansi	2	buatan lokal	2018	Pembelian	1.540.000,-	
19	Papan Tulis	1	Mitsubishi	2019	Pembelian	1.033.300,-	PAPAN TULIS BERODA
20	Meja Kerja Kayu	2	Lokal / 1/2 biro	2005	Pembelian	1.400.000,-	
21	Meja Kerja Kayu	1	Lokal / Bentuk L	2013	Pembelian	1.500.000,-	Meja Dialog Bentuk L ALAT STUDIO di BAGIAN HUMAS
23	Meja Kayu /Rotan	2	Lokal	2005	pembelian	1.400.000,-	
24	Kursi Tamu	2		2019	Pembelian	3.099.400,-	KURSI TUNGGU RUANG STAF
25	Kursi Rapat	20	Chitose	2004	Pembelian	3.220.000,-	
26	Kursi Putar	5	Tiger	2011	Pembelian	1.994.480,-	
27	Kursi Putar	7	FRONTLINE / KURSI PUTAR	2019	Pembelian	6.477.100,-	KURSI PUTAR UNTUK STAF
28	Sofa	1	GUARDIAN / MODERN SOFA	2019	Pembelian	6.184.000,-	SOFA KANTOR + MEJA TAMU
29	Lemari Es	1	sanken / SK/V/171a-CB	2019	pembelian	3.850.200,-	
30	A.C. Window	4	LG / Inverter	2018	Pembelian	22.000.000,-	
31	A.C. Window	2		2019	Pembelian	11.945.000,-	
32	A.C. Split	1	Polytron / PAC12VE	2017	Pembelian	5.555.000,-	

33	A.C. Split	2	Panasonic / CUYN9SKJ	2017	Pembelian	9.897.800,-	
34	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	LOKAL / LOKAL	2018	Pembelian	1.000.000,-	MEJA MEMASAK
35	Radio	2	Polytron	2013	pembelian	1.000.000,-	
36	Radio	1	Auland / Auland Radio Tuner	2017	Pembelian	2.838.000,-	
37	Televisi	1	Sharp / LCD	2018	Pembelian	6.490.000,-	
38	Televisi	1	Samsung / LCD	2019	Pembelian	7.467.800,-	Televisi LCD
39	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4	SONY	2013	Pembelian	2.000.000,-	Tape
40	Sound System	1	BMB	2011	Pembelian	7.114.433,-	
41	Microphone	1	-	2020	pembelian	2.997.500,-	
42	Microphone	1	-	2020	Pembelian	2.100.000,-	Mic wireless Conference-Podium UHF-898
43	Unit Power Supply	1	ICA / SE 1102C11	2019	Pembelian	3.410.200,-	UPS SERVER SE Series online Sinewave UPS
45	Camera Video	1	SONY / CYBERSHOT DSC-HX350	2019	Pembelian	5.063.000,-	CAMERA DIGITAL
46	Camera Video	1	SONY / HXR-MC2500	2019	Pembelian	10.126.000,-	HandyCam
47	Alat Pemadam/Portable	1	Celcius	2019	Pembelian	1.081.200,-	
48	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Focus	2018	pembelian	2.420.000,-	
49	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	ACTIV GALANT / MD 180	2018	Pembelian	3.750.000,-	
50	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3	ACTIV GALANT / MTO 163	2018	Pembelian	8.250.000,-	
51	Meja Kerja Pejabat lain-lain	2	ACTIV / MT120 MELODY	2018	Pembelian	1.000.000,-	

52	Meja Operator	1	LOKAL	2015	Pembelian	3.100.000,-	MEJA SIARAN
53	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	ACTIV GALANT / MKO 121	2018	Pembelian	5.850.000,-	
54	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	ACTIV KENT / KD 104	2018	pembelian	2.850.000,-	
55	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	3	ACTIV KENT / KM 104	2018	Pembelian	7.050.000,-	
56	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	10	Frontline New SC HAD 0212	2014	Pembelian	4.697.000,-	
57	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	PHONEX / PHONEX	2018	Pembelian	1.540.000,-	Kursi Staff
58	Kursi Kerja Pejabat lainnya	3	ACTIV / OC-079H	2018	Pembelian	2.700.000,-	Kursi Studio Radio
59	Kursi Kerja Pejabat lainnya	2	Phoenix / Phoenix	2018	Pembelian	770.00,-	kursi kerja
60	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	12	PHONEX / PHONEX	2018	pembelian	4.620.000,-	
61	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Brother	2006	Pembelian	3.525.500,-	
62	Audio Mixing Console	1		2020	Pembelian	3.850.000,-	Mixer Audio Zumark F4 USB 4 Channel
63	Modulation Monitor Speaker Kabaret	2	Stanton / DJ Pro2000	2017	Pembelian	4.796.000,-	
64	Microphone/Boom Stand	2	Holder Microphone / Condenser	2017	Pembelian	1.386.000,-	
65	Microphone Connector Box	2	Behringer / B1	2017	Pembelian	5.676.000,-	
66	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1	APC / SUA 1000RMI	2014	pembelian	10.465.247.250,-	UPS
67	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Flazer	2011	Pembelian	1.560.916.000,-	
68	Digital Audio Taperecorder	2	Sony / ICD-PX470	2018	Pembelian	2.400.000,-	IP RECORDER
69	Cable	1		2020	Pembelian	5.714.500,-	Kabel HDMI

70	Cable	1		2020	Pembelian	1.000.000,-	erkabelan (Set Kabel Audio Kabel Listrik dll)
71	peralatan studio audio lainnya(dst)	1	YAMAHA MGP16X / MIXER AUDIO	2016	Pembelian	10.928.500,-	MIXER AUDIO STUDIO
72	peralatan studio audio lainnya(dst)	2		2019	pembelian	7.150.500,-	Running Text
73	Video Monitor	1	Lokal / LED	2014	Pembelian	690.685.700,-	Videotron
74	Video Switcher	1	ATEM	2020	Pembelian	7.250.000,-	Blackmagic DesignATEM Mini HDMI Live Stream Switcher
75	Camera View Finder	1	Silicon / 24SE7EN	2017	Pembelian	6.534.000,-	
76	Camera View Finder	1	HIKVISION / 16 CHANNEL	2019	Pembelian	9.053.000,-	NVR CCTV di gdg Data center, iP CAMERA
77	Camera View Finder	1		2019	Pembelian	12.436.100,-	
78	Layar Film/Projector	1	VIEWSONIC / DLP PROJECTOR	2019	pembelian	5.063.000,-	
79	Head Set	1	Logitech / G331	2020	Pembelian		Stereo Gaming Headset
80	Lampu Blitz Kamera	1		2020	Pembelian		Kamera Lighting
81	Video Splitter	1	PX-HD2	2020	Pembelian	3.300.000,-	Splitter HDMI 1 input 8 Output
82	Camera Conference	1		2020	Pembelian	3.900.000,-	RCC aibency 1080p HD Conference Camera
83	Alat Studio Video Lainnya	1	Rexus	2020	Pembelian	4.500.000,-	Video Capture Rexus HD100 4k Record And Streaming
84	Kamera Udara	1		2020	pembelian	19.068.500,-	Drone Kelengkapannya dan

85	Telephone (PABX)	2	Panasonic	2017	Pembelian	605.000,-	
86	Handy Talky (HT)	1	Quansheng	2013	Pembelian	5.484,600,-	
87	Handy Talky (HT)	1	Quansheng / TG-UV2	2014	Pembelian	15.600,000,-	
88	Handy Talky (HT)	1	Quansheng / TG-UV2	2014	Pembelian	11.700,000,-	
89	Handy Talky (HT)	4	Kenwood	2019	Pembelian	14.697.500,-	
90	Peralatan Jaringan Lainnya	3	RB / RB911G-5HPnD-QRT	2014	Pembelian	17.400,000,-	-
91	Radio CPE Airgrid	1	-	2014	Pembelian	2.750,000,-	-
92	Radio CPE Nano Bridge	1	-	2014	Pembelian	1.800,000,-	-
93	Raouter Indoor	3	-	2014	Pembelian	3.300,000,-	-
94	Pangkon Antena	4	-	2014	Pembelian	1.750,000,-	-
95	Cable STP Cat 5 or Cat 6	1	Belden / STP	2014	Pembelian	1.980,000,-	-
96	Conector RJ 45	1	Tought / RJ 45	2014	Pembelian	620,000,-	-
97	Rack Mount	1	Lokal / 1 Pintu/19 inc	2014	Pembelian	4.500,000,-	-
98	RB 951 U	1	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	950,000,-	-

99	Radio Sektor High Power Back Bone	1	-	2014	Pembelian	17.572,500,-	-
100	Radio CPE Air Grid 23 BDEE SKPD	6	-	2014	Pembelian	13.007,500,-	-
101	POE 24v 0,5 Ampere	4	-	2015	Pembelian	1.100,000,-	-
102	Adaptor Mikrotik 24 volt 1 Ampere	3	-	2015	Pembelian	825,000,-	
103	TL WA 5210 G	2	-	2015	Pembelian	1.705,000,-	
104	Pangkon Antena	7	-	2015	Pembelian	2.695,000,-	
105	Acces Point	2	D Link / IIAT	2014	Pembelian	950,000,-	
106	Software	1	Win Server3	2014	Pembelian	15.819,910,-	Ms. Server License
107	Switch Backer	1	Switch HP/ Procurve	2014	Pembelian	10.004,210,-	Switch Hub
108	Stand Mic	1		2015	Pembelian	715,000,-	
109	Switches/Antena Menara Lainnya	1		2015	Pembelian	21.325,000,-	Pemasangan Grounding Tower
110	Wireless Amplifier	1	Lokal	2013	Pembelian	288.984,000,-	
111	Audio Processor	1		2015	Pembelian	935,000,-	
112	Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya	1	Lokal / Besi	2014	Pembelian	30.500,000,-	Tower Jaringan

113	Unit Pemancar Fm/Mw Port	1	Lokal	2013	Pembelian	288.984,000,-	Pemancar Radio
114	Switch Backer	1	Switch HP / Procurve	2014	Pembelian	10.004,210,-	
115	Meja Kerja	10 Buah	Active Vino MT 120 Beac	2014	Pembelian	5.808,000,-	
116	Bangunan Menara	1			Pembelian	796.125,700,-	
117	Instalasi Air Bersih/ Air Baku Lainnya	1			Pembelian	5.450,000,-	Instalasi PDAM
118	Telex	1		2015	Pembelian	715.000,-	
119	Facsimile	1	Panasonic	2017	Pembelian	2.238.500,-	
120	Mesin Genset	1	Maxtron / MV - 28 TD	2013	Pembelian	74.360,000,-	
121	P.C. Unit	1	Core i7, NVidia 4 GB, Ram 16 GB	2016	Pembelian	24.860,000,-	PC Unit, Rakitan Casing Infinity, Core i7, NVidia 4 GB, Ram 16 GB,
122	P.C. Unit	1	HP / Pavilion All in One 20 - A210L	2014	Pembelian	7.400,000,-	
123	P.C. Unit	2	LG	2013	Pembelian	17.952,000,-	
124	P.C. Unit	1	LG	2013	Pembelian	5.882,880,-	
125	P.C. Unit	1	HP	2014	Pembelian	17.930,000,-	Pengadaan Komputer PC (Multimedia)

126	P.C. Unit	3	ecs	2014	Pembelian	18.513,000,-	
127	P.C Unit	4	LENOVO / PC DEKSTOP IC510-151CB	2019	Pembelian	39.483.200,-	PC DEKSTOP IC510-151CB (i5-9400,4GB DDR4, 2TB,21,5&qout:, Win 10 HSL
128	P.C Unit	2	ACER / Savio	2018	Pembelian	11.440.000,-	
129	P.C Unit	1	HP / HP 22-C0035D (3JV78AA)	2019	Pembelian	10.126.000,-	ALL IN ONE
130	P.C Unit	2	LENOVO / PC ALL IN ONE A340-22IWL AIO	2019	Pembelian	17.541.280.-	PC ALL IN ONE A340 - 22IWL AIO (i3-8145U,4GB DDR4, 1TVB, 21,5", Win 10 Home)
131	Note Book	1	Tosiba / Satellite P745	2012	Pembelian	11.119,850,-	
132	Note Book	1	DELL / INSPIRON 5459	2015	Pembelian	14.850,000,-	
133	Note Book	2	LENOVO / / 14" Core i3, 500GB	2016	Pembelian	14.960,000,-	
134	Hardisk	1	-	2015	Pembelian	1.925,000,-	
135	Hardisk	2	TOSHIBA/CANVIO - EKSTERNAL HARDISK	2016	Pembelian	3.960,000,-	
136	Printer	1	Canon / Pixma MX397	2013	Pembelian	1.848,910,-	Pengadaan Printer Multifungsi
137	Printer	2	Canon / pixma MX 397	2014	Pembelian	1.452,000,-	

138	Printer	3	Canon / Pixma IP 2770	2014	Pembelian	2.359,500,-	
139	Printer	2	Canon / MX 397	2014	Pembelian	2.900,000,-	
140	Printer	1	Canon / E610	2015	Pembelian	2.420,000,-	Printer Multi Fungsi
141	Printer	2	EPSON / L120	2016	Pembelian	4.950,000,-	
142	Printer	3	EPSON / ECOTANK L3150	2019	Pembelian	10.638.600,-	
143	Printer	1	CANON / IP2770	2018	Pembelian	1.056.000,-	
144	Printer	1	CANON / IP2770	2018	Pembelian	1.000.000,-	
145	Printer	1	CANON / MX497	2018	Pembelian	3.400.000,-	PRINTER PSC
146	Printer	3	CANON / PIXMA iP2770	2019	Pembelian	3.637.350,-	PRINTER PIXM AiP2770
147	Hard Disk	2	DELL / Hard disk Server	2019	Pembelian	11.234.000,-	1,2TB 10K RPM SAS 12Gbps
148	Lap Top	3	ACER / E5-476G-599H	2018	Pembelian	28.200.000,-	
149	Lap Top	4	DELL / Inspiron 14 3000, core i5,	2019	Pembelian	36.466.200,-	
150	Lap Top	1	Asus / ROG STRIX SCAR	2020	Pembelian	37.125.000,-	
151	Server	1	HP Proliant / DL 360pG8	2014	Pembelian	75.332,910,-	

152	Server	1	DELL-PowerEdge / Power Edge - R730	2018	Pembelian	64.850.560,-	
153	Router	19	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	48.906,000,-	Router Indor SKPD
154	Router	1	CCR / 1009-8G-1S	2014	Pembelian	15.300,000,-	Router Utama
155	Router	1	RB / 951G-2HND	2014	Pembelian	8.500,000,-	Backup Router Utama
156	Router	7	-	2015	Pembelian	12.870,000,-	Router Indoor SKPD
157	Router	4	MIKROTIK / RB 951Ui - 2HnD	2018	Pembelian	4.423.600,-	
158	Hub.	1	lokal / 16 10/100 Mbps	2014	Pembelian	700,000,-	Swich HUB
159	Hub	4	Dlink / DGS-1008A	2018	Pembelian	1.551.200,-	
160	Radio Sektor Hight Power Back Bone	9	UNNT / Nsm 5 HP	2014	Pembelian	39.105,000,-	Peralatan Jaringan
161	Radio CPE Air Grid 23 DBI SKPD	16	Specs Atheros / M5HP23dBI	2014	Pembelian	38.335,000,-	Peralatan Jaringan
162	Pangkon Antena	26	Lokal / Besi	2014	Pembelian	10.010,000,-	Peralatan Jaringan
163	Kabel STP Cat 5	3	STP / Cat 5	2014	Pembelian	14.685,000,-	Peralatan Jaringan
164	Box Panel Back Bone	3	Lokal / Alumunium Coating	2014	Pembelian	675,000,-	Peralatan Jaringan
165	Swich 8 Port fast Ethernet Back Bone	3	Edimax / ES-3308P	2014	Pembelian	784,000,-	Peralatan Jaringan

166	Kabel STP Cat 5	3	STP / Cat 5	2014	Pembelian	13.350,000,-	Peralatan Jaringan
167	Konektor Cat 6	2	Cat 6 / Solid PE	2014	Pembelian	2.100,000,-	Peralatan Jaringan
168	Peralatan Jaringan Lainnya	3	RB / RB911G-5HPnD-QRT	2014	Pembelian	17.400,000,-	-
169	Radio CPE Airgrid	1	-	2014	Pembelian	2.750,000,-	-
170	Radio CPE Nano Bridge	1	-	2014	Pembelian	1.800,000,-	-
171	Raouter Indoor	3	-	2014	Pembelian	3.300,000,-	-
172	Pangkon Antena	4	-	2014	Pembelian	1.750,000,-	-
173	Cable STP Cat 5 or Cat 6	1	Belden / STP	2014	Pembelian	1.980,000,-	-
174	Conector RJ 45	1	Tought / RJ 45	2014	Pembelian	620,000,-	-
175	Rack Mount	1	Lokal / 1 Pintu/19 inc	2014	Pembelian	4.500,000,-	-
176	RB 951 U	1	RB / 951Ui-2HND	2014	Pembelian	950,000,-	-
177	Radio	2	Plytron	2013	Pembelian	1.000.000,-	-
178	Cassete Recorder	4	SONY	2013	Pembelian	2.000.000,-	-
179	Sound System	1	BMB	2011	Pembelian	7.114.430,-	-

180	Camera Film	1	Canon	2012	Pembelian	7.916,090,-	
181	Handy Cam	1	SONY DCR-PJ10	2013	Pembelian	4.741,970,-	
182	Unit Pemancar MF/MWTransportable	1	RVR / RVR30W	2017	Pembelian	41.690.000,-	
183	Unit Pemancar VHF/FM Portable	1	RVR / TEX2000LIG HT	2019	Pembelian	126.620.000,-	PEMANCAR RADIO FM/TRANSMITTER
184	Tripod	1		2020	Pembelian	1.996.500,-	
185	Stabilizer	1		2020	Pembelian	7.491.000,-	Stabilizer Kamera
186	Transmitter	2		2020	Pembelian	11.600.000,-	Wireless Video Sender Hollyland Mars 300 Pro
187	Kontrol Elektronik	1		2020	Pembelian	1.350.000,-	Controller Kamera(Rotator CCTV Beserta Controllernya)
188	Kamera Digital	1	Sony / HXR-MC2500	2020	Pembelian	14.575.000,-	
189	Kamera Digital	1	SONY / A6400	2020	Pembelian	19.981.500,-	1 set dengan lensa
190	Komputer Jaringan lainnya	3	DELL / Dual Rank Memory	2019	Pembelian	17.701.280,-	Memory Ser+A4 : A14ver 16 GB RDIMM,2400MT/s
191	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	ICA - UPS / SE1102C11	2018	Pembelian	34.004.300,-	
192	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	BENQ GL20170, LOGITECH - MK200 / GL2017 , MK200	2018	Pembelian	1.494.600,-	
193	peralatan mainframe lainnya (dst)	1	MIKROTIK / Routerboard - CCR 1036-12G-4S	2018	Pembelian	17.278.100,-	

194	Netware Interface External	1	TP - LINK / TL-R470T+	2018	Pembelian	700.800,-	Load Balance
195	Netware Interface External	2	Ubiquiti Rocket Kit / Ubiquiti 5 Ghz 30 DBI Rocket Didh W	2018	Pembelian	6.434.000,-	Pemancar Jaringan Data Komputer untuk Komunikasi Data
196	Netware Interface External	4	UBIQUITI / Airmax 5Ghz powerbeam 400MM	2018	Pembelian	6.616.000,-	
197	Netware Interface External	2	Ubiquiti / Rocket M5	2018	Pembelian	2.537.916,-	
198	Netware Interface External	2	UBIQUITI / ROCKET M5 5GHz,up 150 Mbps	2018	Pembelian	2.712.000,-	
199	Netware Interface External	1	Modena (Tool Kit) / Modena100 pcs	2018	Pembelian	1.080.000,-	
200	Netware Interface External	1	BNC (Lan Tester) / NF 3468	2018	Pembelian	450.000,-	
201	Netware Interface External	1	Heles (Avometer) / YX393	2018	Pembelian	420.000,-	
202	Netware Interface External	1	Antel (solder Absorption) / DS.4	2018	Pembelian	140.000,-	
203	Netware Interface External	1	Talon (Crimping Tool) / TL-2810R	2018	Pembelian	540.000,-	

204	Netware Interface External	10		2018	Pembelian	98.940.000,-	Pemasangan groundingdi 10 titik di kecamatan
205	Netware Interface External	1		2019	Pembelian	48.837.380,-	ROUTER WIRELES (RB9151G- 2HnD),ACCESS POINT NANOSTATION M2 (NSM2),SWITCH HUB 8 (DGS-108),KABEL UTP STP CAT 5E,KONEKTOR RJ45, ACCESS POINT UNIFI AP AC LONG RANGE (UAP-AC-LR)
206	Mobile Modem GSM/ CDMA	1		2020	Pembelian	1.200.000,-	
207	Peralatan Jaringan lainnya	2	UBIQUITI / Airmax 5 Ghz Nano Mimo	2018	Pembelian	2.906.000,-	Pemancar Jaringan Komputer untuk Komunikasi Data
208	Peralatan Jaringan lainnya	8	UBIQUITI / Airmax 2.4 GhzNano Mimo	2018	Pembelian	10.924.000,-	Pemancar Jaringan Komputer untuk Komunikasi Data

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Ukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian target kinerja pada Rencana Strategis Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Pada Tabel 2.3 dapat dijelaskan bahwa :

- a. Capaian keseluruhan target indikator pada Renstra periode 2016-2021 secara keseluruhan masih perlu dioptimalkan. Penyebab utama dari kondisi tersebut terletak pada faktor Sumber Daya Manusia baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.
- b. Penentuan indikator tujuan dan sasaran juga perlu dipertimbangkan untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi riil dilapangan.
- c. Sinkronisasi tujuan dan sasaran pada semua jenjang juga perlu mendapatkan perhatian yang lebih baik secara horizontal maupun vertikal

Pada Tabel 2.4 yang merupakan gambaran dari ketersediaan anggaran beserta ratio realisasinya, tergambar dengan hasil bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada anggaran yang tertangani dengan baik, dilain pihak ada pula yang kurang. Faktor SDM menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius. Memang bukan suatu hal yang mudah dalam manajemen SDM ini, karena menyangkut banyak faktor. Hal yang tidak kalah penting dalam realisasi anggaran ini adalah monitoring yang harus dilakukan secara periodik dan terus menerus.

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah																			
NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase media informasi publik			Indek Kepuasan Pelayanan Masyarakat	Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	Tidak Baik	Tidak Baik	Cukup Baik	Cukup Baik	Baik	83.3	86	87.5	77.8	84.2
					60	70	80	90	95	50	60	70	70	80					
2	Persentase Aplikasi yang dikembangkan			Indek Peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.5	2.8	3.4	3.9	4.5	0	0	0	2.5	2.84	0	0	0	64.1	63.1
3	Persentase Item data statistik daerah yang disajikan			Persentase skpd yang menyampaikan kelengkapan data lengkap dan valid	45%	60%	70%	80%	90%	0%	50%	60%	70%	80%	0	83.3	85.7	87.5	88.9
4	Persentase Sarana dan Prasarana infrastruktur yang standard			Persentase SKPD menerapkan standarisasi pengamanan informasi dan persandian	0%	0%	0%	50%	65%	0%	0%	0%	40%	0%	0	0	0	80	0

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika																	
Kabupaten Hulu Sungai Tengah																	
Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	246,205,750	498,950,668	586,440,900	568,887,350	-	180,779,916	252,245,806	479,694,161	521,540,815	-	73.4	50.6	81.8	91.7	39.07	46.14
Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	-	54,750,000	35,130,061	165,370,000	44,055,000	-	50,349,689	35,015,000	96,720,497	41,657,561	-	92.0	99.7	58.5	94.6	87.18	29.61
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan	-	11,373,000	17,650,000	19,350,000	5,954,000	-	10,269,200	13,048,800	18,366,500	977,950	-	90.3	73.9	94.9	16.4	(1.47)	(8.95)
Pengembangan dan pengolahan komunikasi publik	-	7,255,000	4,400,000	6,500,000	3,025,000	-	5,475,000	-	3,215,750	3,000,000	-	75.5	-	49.5	99.2	(15.03)	0.00

Pengembangan dan pengolahan informasi publik	-	355,420,000	685,640,000	410,890,000	70,370,000	-	316,556,733	448,066,650	349,087,835	67,061,562	-	89.1	65.4	85.0	95.3	(10.01)	(20.45)
Pengembangan dan Pengolahan E-Government	-	17,625,000	18,500,000	180,500,000	156,600,000	-	13,786,000	18,180,000	112,278,187	152,007,050	-	78.2	98.3	62.2	97.1	289.13	194.95
Pengembangan dan Pengolahan infrastruktur TIK	-	321,455,700	323,433,076	1,153,750,000	1,540,000,000	-	314,747,500	286,251,842	986,233,362	1,472,801,460	-	97.9	88.5	85.5	95.6	96.94	94.94
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, dokumentasi kehumasan	-	-	-	-	36,550,000	-	-	-	-	32,548,000	-	-	-	-	89.1	0.00	0.00
Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Melalui Media	-	-	-	-	2,316,675,000	-	-	-	-	2,046,867,500	-	-	-	-	88.4	0.00	0.00
Program pengembangan data/informasi /statistik daerah	-	215,932,000	60,305,000	65,144,200	8,470,000	-	189,970,000	59,500,000	39,695,000	8,470,000	-	88.0	98.7	60.9	100.0	(50.35)	(60.21)

Pengembangan pengaman Informasi dan Persandian	-	-	7,500,000	-	-	-	7,350,000	-	-	-	-	98.0	-	(33.33)	(33.33)		
	-	1,230,016,450	1,644,008,805	2,587,945,100	4,750,586,350	-	1,081,934,038	1,112,308,098	2,085,291,292	4,346,931,898		88.0	67.7	80.6	91.5	58.21	66.25

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah

Tantangan :

1. Globalisasi informasi yang berdampak pada keterbukaan informasi publik
2. Kesenjangan informasi di masyarakat
3. Pesatnya perkembangan TIK
4. Ketersediaan Infrastruktur TIK yang belum merata
5. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap TIK
6. Keanekaragaman data statistik
7. Pengamanan Informasi

Peluang :

1. Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, statistik, dan Persandian
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik
4. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government
5. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai Kabupaten yang secara astronomis berada pada $2^{\circ}36.5'S$ $115^{\circ}18'E$. Kabupaten Hulu Sungai Tengah berlokasi di sebelah utara Provinsi Kalimantan Selatan, daerah Hulu Sungai Kalimantan Selatan dengan orbitasi berada di 165 km dari kota Banjarmasin yang umumnya disebut kawasan *Banua Anam*. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru, Sebelah Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Sebelah Barat dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan sebelah utara dengan Kabupaten Balangan. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sangat strategis seyogyanya ditunjang dengan *ekosistem* komunikasi dan informatika yang memadai, dengan harapan gerak perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat

Untuk lebih dalam mengetahui permasalahan yang akan di tindaklanjuti Dinas Komunikasi dan Informatika perlu dilakukan suatu analisis terhadap situasi dan kondisi riil, yang disesuaikan dengan kewenangan tugas pokok serta fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika yang dijabarkan menjadi isu-isu strategis . Tabel-tabel dibawah ini merupakan gambaran kondisi tersebut.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Hulu Sungai Tengah

NO	Permasalahan pelayanan SKPD	Faktor yang mempengaruhi pelayanan	
		Kewenangan internal SKPD	Diluar kewenangan Internal SKPD
1.	Kurangnya akses dan kualitas informasi publik	<ul style="list-style-type: none"> - belum optimalnya pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat - Belum optimalnya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik - Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik - Belum optimalnya kapasitas PPID - Belum optimalnya kerjasama media 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis komunikasi dan kehumasan - Terbatasnya ketersediaan anggaran

		<ul style="list-style-type: none">- Belum terkelolanya mitrastrategis pemerintah- Kurangnya Sarana Pendukung Informasi	
--	--	---	--

2.	Pengelolaan data statistik sektoral daerah belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral - kurangnya Metadata Statistik Sektoral 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis statistik - Terbatasnya ketersediaan anggaran
3.	Masih rendahnya penerapan e gov perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Belum Optimalnya Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah - Belum Optimalnya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah - Belum Optimalnya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah - Belum Optimalnya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis informatika - Terbatasnya ketersediaan anggaran
4.	Belum optimalnya Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Belum Optimalnya Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis keamanan informasi dan persandian - Terbatasnya ketersediaan anggaran
5.	Manajemen perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah belum terkelola dengan maksimal	<ul style="list-style-type: none"> - Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah seringkali bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain - profesionalisme ASN belum tinggi - Belum optimalnya Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah - Belum optimalnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya SDM yang berlatar belakang teknis perencanaan, keuangan dan pengelolaan aset - Terbatasnya ketersediaan anggaran

		pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah	
--	--	--	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan hasil proses politik yang dilaksanakan melalui Pilkada Kabupaten/Kota tahun 2020, ditetapkan Visi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026, sebagai berikut

“Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)”

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mendukung pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terdapat tiga elemen utama yaitu aspek makmur, aspek unggul, dan aspek dinamis. Penjelasan dari masing-masing elemen adalah sebagai berikut:

1. Makmur yaitu suatu keadaan dimana masyarakat HST dapat merasakan taraf hidup yang layak dan manusiawi yang dapat ditilik dari dimensi material maupun dirasakan melalui dimensi spiritual.
2. Unggul yaitu terwujudnya sumber daya manusia yang memiliki daya saing dan kemandirian kerja serta terciptanya infrastruktur daerah yang efektif dan mampu mendorong semangat yang kompetitif.
3. Dinamis merupakan wujud suasana kehidupan dimana masyarakat memanfaatkan nilai-nilai positif dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap menjaga norma agama dan budaya luhur sebagai jadi diri. Dinamis dalam konteks ini adalah merupakan konklusi dari terwujudnya kemakmuran suatu daerah dengan keunggulan sumber daya manusianya.

Untuk mendukung terwujudnya Visi Kepala Daerah harus didukung misi yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan , adapun misi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Tata Kehidupan Sosial Dengan Nilai-Nilai Spritual dan Kultural.
2. *Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional.*
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Dengan Prinsip Memanusiakan Manusia.
4. Mengembangkan Perekonomian Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Dengan Prinsip Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Kreatif Dalam Upaya Menciptakan Lapangan Kerja dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Hidup.
5. Menjadikan Hulu Sungai Tengah Sebagai Kabupaten Yang Menerapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Lestari dan Tata Kelola Yang Memperkuat Daya Dukung Lingkungan Dan Sosial.

Dari pernyataan misi kepala daerah tersebut, yang berkaitan dengan urusan bidang komunikasi dan informatika adalah misi ke 2 yaitu misi *Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional*.

Program Kerja Prioritas Kepala Daerah yang diimplementasikan dalam tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan faktor-faktor yang menjadi penghambat, pendorong terkait permasalahan pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Tabel. 3.2

Visi : “Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Lebih Makmur, Unggul, dan Dinamis (MUDA)”				
No	Misi dan Program Prioritas KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
I	Misi : Mewujudkan Pemerintahan Yang Berintegritas, Responsif dan Profesional (misi II)			
1.	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan Professional di bidang Komunikasi Publik - Kurangnya sarana prasarana pendukung informasi publik 	Adanya Kepedulian pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
2.	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Belum optimalnya penerapan e-Government	<ul style="list-style-type: none"> - Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan Professional di bidang TIK - Kurangnya sarana prasarana pendukung TIK 	Adanya kepedulian pemerintah daerah meningkatkan pengembangan, pengelolaan aplikasi dan web untuk pelayanan publik dengan bermacam — macam jenis aplikasi.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020- 2024 (Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024) ini disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Selain itu, juga mengacu pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) global dengan memasukkan unsur-unsur perkembangan teknologi di dalam melakukan peta strategi pengelolaan, penyelenggaraan, hingga pemanfaatan di bidang TIK.

Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

Tabel dibawah ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedangkan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan belum dapat disampaikan, karena sampai dengan renstra ini disusun, dalam waktu yang bersamaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam proses penyusunan.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan PD Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Sasaran Jangka Menengah Renstra Diskominfo Prov Kalsel	Permasalahan yang mempengaruhi terhadap pelayanan SKPD	Faktor-Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis;		Kurangnya pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan Bisnis	Respon masyarakat dalam pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan Bisnis belum merata	Adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sektor ekonomi dan bisnis melalui pemanfaatan TIK
2.	Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital;		Pemanfaatan TIK masih berorientasi hiburan daripada pembelajaran	Pembelajaran menuju masyarakat cerdas digital minimal secara kuantitas dan kualitas	Adanya kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kecerdasan digital
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik		Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	- Terbatasnya sumberdaya manusia pemerintah daerah yang trampil dan	Adanya Kepedulian pemerintah daerah terhadap program prioritas untuk

				Professional di bidang Komunikasi Publik - Kurangnya sarana prasarana pendukung informasi publik	Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan public
4.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.		Belum optimalnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	Terbatasnya SDM perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah,	Kebutuhan akan SDM perencanaan, keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah sangat tinggi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pengembangan suatu wilayah sangat ditentukan pada kondisi wilayah dan daerah, dengan berlandaskan memiliki wilayah dan daerah yang sama maka dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika ditujukan melalui telaahan antara indikasi program dengan pemanfaatan ruang dalam jangka menengah. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang.

Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan urusan komunikasi dan informatika, tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Terhadap Pembangunan Komunikasi dan Informatika

No.	RTRW terkait Tugasdan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Pembangunan Jaringan Komunikasi	Layanan Komunikasi publik masih belum sesuai harapan	Merupakan kewenangan Kementrian/swasta	Tingginya ekspektasi masyarakat
2.	Penataan dan penyusunan pedoman system jaringan komunikasi	Belum adanya pedoman system jaringan komunikasi	Merupakan kewenangan Kementrian	Urgensi peningkatan layanan
3.	Pengembangan dan perluasan cakupan pelayanan jaringan distribusi telepon kabel	Layanan telepon kabel kurang diminati	Merupakan kewenangan Kementrian/swasta	-
4.	Pengembangan fasilitas hotspot pada fasilitas publik	Belum semua fasilitas publik tersedia asilitas hotspot	Terbatasnya Ketersediaan anggaran	Tingginya ekspektasi masyarakat
5.	Pengembangan menara bersama BTS	Masih adanya wilayah blankspot	Merupakan kewenangan Kementrian/swasta	Tingginya ekspektasi masyarakat
6.	Penyusunan Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/Cell Planing	Belum adanya Kajian Teknis Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/Cell Planing	Keterbatasan SDM dan Ketersediaan anggaran	Urgensi ketersediaan pedoman teknis

2. Telaahan KLHS Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Dalam penyusunan KLHS RPJMD salah satu variabel yang menjadi bahan evaluasi adalah data-data capaian pembangunan sektoral berdasarkan indikator yang ditetapkan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia. Ada 7 (tujuh) indikator TPB untuk urusan Komunikasi dan Informatika. Masih diperlukan penyamaan persepsi apakah dari tujuh indikator tersebut semuanya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota. Berdasarkan kemampuan, Kabupaten/Kota mungkin baru dapat mengampu 1 (Satu) indikator saja, yaitu : *“Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”*, sedangkan untuk 6 (enam) indikator lainnya merupakan kewenangan Pusat atau Provinsi.

Hasil analisis terhadap permasalahan dari telaahan dokumen KLHS Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026 tidak di dapatkan rekomendasi pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, namun jika mengacu kepada capaian indikator TPB/SDGs dapat digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Analisis KLHS(TPB)

No.	Hasil KLHS (TPB) Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika	Permasalahan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
2.	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
3.	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
4.	Proporsi individu yang menggunakan internet	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
5.	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan	Belum optimalnya kapasitas PPID	Pemahaman stakeholder terhadap pentingnya penguatan PPID masih kurang	Kebutuhan masyarakat terhadap Pelayanan Informasi Daerah cukup tinggi
6.	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data
7.	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan	Belum tersedia data	Merupakan kewenangan Pusat	Tuntutan ketersediaan data

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah di tinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah,

Dalam melaksanakan urusan konkuren Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian masih banyak tugas dan fungsi belum terlaksana

secara optimal khususnya penyebaran informasi pemerintah daerah kemasyarakatan dan penerapan e-government perangkat daerah.

2. Sasaran jangka menengah pada Renstra Kementerian

Fokus Renstra Kemenkominfo Tahun 2020-2024 diarahkan untuk mencapai 3 (tiga) tujuan utama yaitu percepatan penyediaan infrastruktur TIK ke seluruh wilayah Indonesia, percepatan transformasi digital dalam 3 (tiga) kerangka nasional yaitu industri, pemerintahan, dan masyarakat, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.

3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Selatan belum dapat disampaikan, karena sampai dengan renstra ini disusun, dalam waktu yang bersamaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan masih dalam proses penyusunan.

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan urusan komunikasi dan informatika yaitu Pengembangan fasilitas hotspot pada fasilitas publik, sedangkan indikator lainnya merupakan kewenangan kementerian/swasta.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Berdasarkan kemampuan, Kabupaten/Kota mungkin baru dapat mengampu 1 (satu) indikator saja, yaitu : *“Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”*, sedangkan untuk 6 (enam) indikator lainnya merupakan kewenangan Pusat atau Provinsi.

Metode penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani adalah melalui analisis faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan oleh Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan memperhatikan saran dan masukan dari pihak-pihak terkait baik melalui rapat konsultasi, forum Perangkat Daerah dan lain-lain.

Dari berbagai kondisi diatas, dapat tergambar isu-isu strategis yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun Renstra 2021-2026, sebagai berikut :

1. Peningkatan layanan komunikasi, informasi publik dan kualitas data statistik diKab. HST
2. Peningkatan Pengelolaan dan Pengembangan TIK, E-Government dan Persandian Kab. HST

3. Peningkatan kapasitas aparatur diskominfo yang terlatih dan terampil di bidang TIK, Komunikasi dan Informasi Publik
4. Peningkatan pemanfaatan TIK sektor ekonomi dan bisnis.
5. Mewujudkan masyarakat cerdas digital.
6. Reformasi Birokrasi Diskominfo

BAB. IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagai representasi visi dan misi pembangunan jangka menengah, maka setelah melakukan review terhadap rencana Dinas Komunikasi dan Informatika 2021-2023 yang didampingi tim fasilitator dari Bappelitbangda ditetapkan sasaran pembangunan pada masing-masing tujuan sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :

- a. Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan
- b. Meningkatnya penerapan e-Government

Tujuan 2: Meningkatnya pengelolaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya Penyediaan Data

Tujuan 3: Meningkatnya pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan sasaran :

Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian

Tujuan 4: Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional, dengan sasaran : Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo

Gambaran tujuan dan sasaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks SPBE	2,84	2,86	2,88	2,90	2,92	2,94	3,00
2	Meningkatnya pengelolaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi (satu data kabupaten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks KAMI	212	246	280	314	348	382	419
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Indek RB Diskominfo	30,83	31,5	32	32,5	33	33,5	34

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarkan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase Peningkatan kematangan Indeks SPBE	30%	30%	38%	90%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penyediaan Data	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	1. nilai sakip Diskominfo 2. persentase penyerapan anggaran	1. 76,5 2. 80%	1. 78 2. 80%	1. 79 80%	1. 82 2. 82%	1. 83 2. 85%	1. 84 2. 87%	1. 85 2. 90%

BAB. V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Strategi yang diambil untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan informasi adalah dengan peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika. Dengan adanya peningkatan pelayanan publik yang didukung Teknologi Informasi dan Komunikasi, diharapkan dapat mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan lebih baik dengan prosedur yang sederhana, mudah, cepat dan akurat serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan Tugas pokok dan fungsi SKPD kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat
- b. Menguatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik
- c. Menguatkan pengelolaan media komunikasi publik
- d. Menguatkan Kapasitas PPID
- e. Menguatkan kerjasama media
- f. Optimalisasi kemitraan strategis pemerintah
- g. Penguatan Sumberdaya komunikasi publik
- h. Pemenuhan Sarana Pendukung Informasi

2. Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan SubDomain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- b. Optimalisasi Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Penguatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
- d. Penguatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
- e. Penguatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- f. Penguatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

3. Mengupayakan kelengkapan data statistik sektoral daerah

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Penguatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
- b. Penguatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
- c. Pemenuhan Metadata Statistik Sektoral

4. Meningkatkan Pengelolaan Pengamanan Informasi dan Persandian

Kebijakan yang akan dijalankan:

Penguatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

5. Optimalisasi Manajemen, Keuangan, Kepegawaian, Barang Milik Daerah, dan kinerja perangkat daerah

Kebijakan yang akan dijalankan:

- a. Meningkatkan koordinasi agar Jadwal Proses Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tidak bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain
- b. Penguatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- c. Penguatan Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah
- d. Penguatan pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

Terwujudnya Hulu Sungai Tengah yang lebih Makmur, Unggul dan Dinamis (MUDA)			
Misi II : Mewujudkan Pemerintah yang Berintegritas, Responsif, dan Profesional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat 2. Menguatkan pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik 3. Menguatkan pengelolaan media komunikasi publik 4. Menguatkan kapasitas PPID 5. Menguatkan kerjasama media 6. Optimalisasi kemitraan strategis pemerintah 7. Pemenuhan sarana pendukung informasi
	Meningkatnya penerapan e-Government	Meningkatkan kelembagaan dan tata laksana organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 2. Optimalisasi penatalaksanaan dan pengawasan e-government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah 3. Penguatan pengelolaan pusat data pemerintah daerah 4. Penguatan penyelenggaraan sistem komunikasi intra pemerintah berbasis elektronik 5. Penguatan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah
Meningkatnya pengelolaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Penyediaan Data	Mengupayakan kelengkapan data statistik sektoral daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral 2. Penguatan kapasitas SDM pemerintah daerah dalam peningkatan mutu statistik daerah 3. Pemenuhan metadata statistik sektoral

Meningkatnya pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Meningkatkan pengelolaan pengamanan informasi dan persandian	1. Penguatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	Optimalisasi manajemen, keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi agar jadwal proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak bersamaan waktunya dengan jadwal kegiatan yang lain 2. Penguatan evaluasi kinerja perangkat daerah 3. Penguatan penatausahaan keuangan perangkat daerah 4. Penguatan pengelolaan dan penatausahaan aset/barang milik daerah

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pencapaian beberapa kelompok sasaran maka dibutuhkan beberapa program yang didukung oleh beberapa kegiatan dengan indikator kinerja dan kebutuhan pendanaan indikatifnya.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk kurun waktu tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - 4) Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
 - 5) Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - 6) Sub Kegiatan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
 - 7) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
 - a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Kegiatan Pengelolaan E-Government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten
 - 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
 - 4) Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik

- 5) Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
 - 3) Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
5. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian PD
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 2) Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 3) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 6) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 7) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tabel 6.1

Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

PROGRAM		KEGIATAN		SUB KEGIATAN	
Sasaran Program	Nomeklatur Program	Sasaran Kegiatan	Nomeklatur Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Nomeklatur Sub Kegiatan
Meningkatnya Media Penyebaran Informasi dan Komunikasi yang digunakan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penggunaan Media informasi Non Digital	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan Informasi Publik
		Meningkatnya Penggunaan Media informasi Digital	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Meningkatkan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Pengelolaan Media Komunikasi Publik
		Meningkatnya Jumlah Informasi yang disebarakan	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
				Meningkatkan Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
Meningkatnya Kualitas isi Informasi yang disebarakan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya PPID yang telah menjalankan fungsinya sesuai	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan Layanan Hubungan Media	Layanan Hubungan Media

	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ketentuan yang berlaku	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
				Meningkatkan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
Meningkatnya penerapan e-Government	Program Aplikasi Informatika	Meningkatnya Infrastruktur Egovernment	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
				Meningkatkan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
				Meningkatkan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Meningkatnya Pemenuhan Regulasi Penerapan Egovernment	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatkan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah
Meningkatnya perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun pembangunan daerah	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya data sektoral yang dipublikasikan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
				Meningkatkan Membangun Metadata Statistik Sektoral	Membangun Metadata Statistik Sektoral
Meningkatnya pengamanan sistem elektronik dan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya informasi layanan sistem elektronik yang telah diamankan	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

		Meningkatnya perangkat daerah yang melakukan tata kelola persandian	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
Meningkatnya penyelenggaraan kesekretariatan penunjang urusan Diskominfo	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Meningkatkan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Terselenggaranya penyelesaian administrasi keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Terselenggaranya penyelesaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatkan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
		Terselenggaranya penyelesaian administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
				Meningkatkan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
				Meningkatkan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		Terselenggaranya penyelesaian administrasi umum Perangkat Daerah berjalan sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Meningkatkan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Meningkatkan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Meningkatkan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				Meningkatkan Penyediaan	Penyediaan Bahan Bacaan dan

				Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peraturan Perundang-undangan
				Meningkatkan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Meningkatkan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Meningkatkan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Meningkatkan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Terselenggaranya pengadaan barang Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatkan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Meningkatkan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Meningkatkan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		Terselenggaranya penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Meningkatkan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Meningkatkan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Meningkatkan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

		Terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				Meningkatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Meningkatkan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Meningkatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Meningkatkan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 6.2

Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
Meningkatkan pengelolaan komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan yang disebar	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebar	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)	40	50	3,224,922,050	60	3,750,220,700	65	3,898,120,100	70	2,643,811,340	75	2,908,192,474	80	3,199,011,721	80	19,624,278,385	Bidang Komunikasi dan Informasi Publik	
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan media penyebaran Informasi dan komunikasi	0	60%	3,224,922,050	70%	3,750,220,700	75%	3,898,120,100	80%	2,643,811,340	85%	2,908,192,474	90%	3,199,011,721	90%	19,624,278,385		
			Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	0	0	-	50	264,376,000	60	178,682,000	70	196,550,200	80	216,205,220	90	237,825,742	350	1,093,639,162		
			Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	0	20	-	30	21,276,800	40	517,890,000	50	569,679,000	60	626,646,900	70	689,311,590	270	2,424,804,290		
			Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3	3	23,592,100,00	3	69,587,000,00	3	24,000,000	2	26,400,000	2	29,040,000	2	31,944,000	2	204,563,100		
			Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	0	3	30,800,000,00	3	1,203,070,200	3	857,257,400	3	942,983,140	3	1,037,281,454	3	1,141,009,599	3	5,212,401,793		
			Layanan Hubungan Media	Jenis Layanan Hubungan Media	1	4	3,088,816,700	2	2,129,226,700	4	337,298,000	4	371,027,800	4	408,130,580	4	448,943,638	4	6,783,443,418		
			Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1	2	77,737,000	2	3,660,000	3	5,490,000	3	6,039,000	4	6,642,900	4	7,307,190	4	106,876,090		
Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase perangkat daerah yang menerapkan e gov	Presentase Perangkat Daerah yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Presentase Aplikasi yang terintegrasi	38%	38%	2,357,491,000	48%	3,559,328,834	58%	4,102,747,060	68%	4,513,021,766	78%	4,964,323,943	88%	5,460,756,337	88%	24,957,668,939	Bidang Informatika dan Persandian	
			Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan domain resmi	24%	35%	-	46%	2,100,000	57%	10,000,000	68%	11,000,000	84%	12,100,000	100%	13,310,000	100%	48,510,000		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
				Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		9	13			17		2,100,000	21	10,000,000	25	11,000,000	31	12,100,000	37	13,310,000	37	48,510,000		
				Pengelolaan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perangkat daerah yang memanfaatkan aplikasi		100%	100%	2,357,491,000	100%		3,557,228,834	100%	4,092,747,060	100%	4,502,021,766	100%	4,952,223,943	100%	5,447,446,337	100%	24,909,158,939			
				Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		36	36	2,164,853,000	36		172,037,644	36	239,637,100	36	263,600,810	36	289,960,891	36	318,956,980	36	3,449,046,425			
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola		1	1		1		140,367,000	1	59,960,000	1	65,956,000	1	72,551,600	1	79,806,760	1	418,641,360			
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah		2	2		2		2,721,747,556	36	3,562,750,560	36	3,919,025,616	36	4,310,928,178	37	4,742,020,995	37	19,256,472,905			
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		8	8	192,638,000.00	8		332,634,634	36	177,587,400	36	195,346,140	36	214,880,754	36	236,368,829	36	1,349,455,757			
				Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		2	3		4		190,442,000	5	52,812,000	6	58,093,200	7	63,902,520	8	70,292,772	8	435,542,492			
Meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral untuk pembangunan	Meningkatnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data sektoral yang terbaharui	100%	100%	23,341,000	100%	94,406,000	100%	110,488,000	100%	121,536,800	100%	133,690,480	100%	147,059,528	100%	630,521,808.00						Bidang Komunikasi dan Informasi Publik
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kelengkapan data sektoral	81%	100%	23,341,000	100%	94,406,000	100%	110,488,000	100%	121,536,800	100%	133,690,480	100%	147,059,528	100%	630,521,808.00						
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		1	2	23,341,000	2		41,370,000	2	41,130,000	2	45,243,000	2	49,767,300	2	54,744,030	2	54,744,030	12	255,595,330		
			Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		0	0		16		7,260,000.00	17	20,360,000	18	22,396,000	19	24,635,600	20	27,099,160	20	101,750,760				

			Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	14	15		16	45,776,000	17	48,998,000	18	53,897,800	19	59,287,580	20	65,216,338	20	273,175,718		
Meningkatkan pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah menerapkan Keamanan Informasi	5.6%	5.6%	-	8.3%	129,344,400	11.1%	141,748,000	13.9%	155,922,800	16.7%	171,515,080	19.4%	188,666,588	19.4%	787,196,868		
			Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar PD	0%	6%		11%	129,344,400	25%	141,748,000	39%	155,922,800	53%	171,515,080	67%	188,666,588	67%	787,196,868		
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1	4		8	129,344,400	12	141,748,000	16	155,922,800	20	171,515,080	24	188,666,588	24	787,196,868		
Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	nilai sakiP Diskominfo dan persentase penyerapan anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan Sekretariat berjalan sesuai sian	100%	100%	13,162,000	100%	10,092,800	100%	14,914,100	100%	16,405,510	100%	2,946,192,670	100%	3,080,231,270	100%	23,354,859,842	Sekretariat	
			Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	100%	7,654,000	100%	10,092,800	100%	14,914,100	100%	16,405,510	100%	18,046,061	100%	19,850,667	100%	86,963,138		
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	3,723,000	4	4,183,200	4	7,054,600	4	7,760,060	4	8,536,066	4	9,389,673	24	40,646,599		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3,931,000	3	5,909,600	3	7,859,500	3	8,645,450	3	9,509,995	3	10,460,995	18	46,316,540		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	100%	2,543,867,460	100%	1,838,144,941	100%	1,553,680,462	100%	1,566,180,462	100%	1,578,680,462	100%	1,591,180,462	100%	10,671,734,249		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17	17	2,543,867,460	18	1,838,144,941	19	1,553,680,462	20	1,566,180,462	21	1,578,680,462	22	1,591,180,462	22	10,671,734,249		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang Diadministrasi sesuai standar	100%	100%	-	100%	6,000,000	100%	6,600,000	100%	7,260,000	100%	7,986,000	100%	8,784,600	100%	36,630,600		
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	-	2	6,000,000	2	6,600,000	2	7,260,000	2	7,986,000	2	8,784,600	12	36,630,600		
			Administrasi Kepegawaian PD	Persentase Pegawai PD yang dilayani	100%	100%	-	100%	16,200,000	100%	34,675,500	100%	18,000,000	100%	18,900,000	100%	19,800,000	100%	107,575,500		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut	0	0	-	18	7,200,000	19	25,400,000	20	8,000,000	21	8,400,000	22	8,800,000	100	57,800,000		
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	17	17	-	18	4,500,000	19	4,750,000	20	5,000,000	21	5,250,000	22	5,500,000	22	25,000,000		
			Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	17	17	-	18	4,500,000	19	4,525,500	20	5,000,000	21	5,250,000	22	5,500,000	117	24,775,500		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	100%	100%	91,256,900	100%	265,344,100	100%	368,284,770	100%	302,401,887	100%	319,469,456	100%	337,193,781	100%	1,683,950,894					
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8	8	1,697,800	8	4,056,700	8	4,000,000	8	4,400,000	8	4,840,000	8	5,324,000	8	24,318,500					
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	16,208,000	2	29,154,500	2	30,085,170	5	33,093,687	5	36,403,056	5	40,043,361	5	184,987,774					
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3	3	8,049,100	3	11,031,900	3	8,950,600	5	16,098,200	5	16,098,200	5	16,098,200	5	76,326,200					
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1482	1482	7,128,000	1482	7,695,000	1584	8,892,000	1584	7,128,000	1584	7,128,000	1584	7,128,000	9300	45,099,000					
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2	2	8,235,000	2	35,020,000	2	25,620,000	2	28,182,000	2	31,000,200	2	34,100,220	12	162,157,420					
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18	18	49,939,000	19	175,886,000	20	287,737,000	21	210,000,000	22	220,000,000	23	230,000,000	123	1,173,562,000					
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	0	0	2,500,000	2	3,000,000	2	3,000,000	2	3,500,000	2	4,000,000	2	4,500,000	10	17,500,000					
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi	50%	50%	-	60%	136,508,100	65%	706,213,600	70%	5,647,524,860	75%	127,742,846	80%	140,517,131	80%	6,758,506,537					
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	600,641,000	1	5,531,395,000	0	-	0	-	1	6,132,036,000					
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	0	-	9	136,508,100	3	105,572,600	2	116,129,860	2	127,742,846	2	140,517,131	18	626,470,537					
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	100%	100%	208,639,400	100%	264,515,000	100%	593,907,000	100%	653,297,700	100%	718,627,470	100%	790,490,217	100%	3,229,476,787					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2	2	4,990,000	3	4,985,000	2	4,689,000	2	5,157,900	2	5,673,690	2	6,241,059	2	31,736,649					
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	140,688,000	3	74,406,000	3	141,960,000	3	156,156,000	3	171,771,600	3	188,948,760	3	873,930,360					
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	62,961,400	12	185,124,000	12	447,258,000	12	491,983,800	12	541,182,180	12	595,300,398	12	2,323,809,778					
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	100%	100%	61,744,700	100%	314,673,900	100%	129,537,500	100%	142,491,250	100%	156,740,375	100%	172,414,413	100%	780,022,138					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	6	39,100,700	6	85,077,900	6	83,649,500	6	92,014,450	6	101,215,895	6	111,337,485	6	512,395,930					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
			Pereliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	16	7,696,000	16	13,116,000	22	11,490,000	22	12,639,000	22	13,902,900	22	15,293,190	22	74,137,090						
			Pereliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2	14,948,000	3	18,900,000	3	34,388,000	3	37,837,800	3	41,621,580	3	45,783,738	3	193,489,118						
			Pereliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	0	-	1	197,580,000																
							8,518,916,510		10,384,778,775		11,660,916,092		15,787,854,375		11,123,914,646		12,075,725,445		69,354,525,843						

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2021 - 2026

Berdasarkan hasil pencermatan terhadap situasi dan kondisi dengan didampingi tim riview Bappelitbangda, maka sebagai komitmen pendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah , berikut disampaikan indikator tujuan dan sasaran hasil riview yang menggambarkan indikator dan target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2021-2026.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021 – 2026

No.	Tujuan	Indikator	Kondisi Awal	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks SPBE	2,84	2,86	2,88	2,90	2,92	2,94	3,00
2	Meningkatnya pengelolaan Data Statistik Sektoral dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi (satu data kabupaten)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya pengelolaan persandian dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks KAMI	212	246	280	314	348	382	419
4	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan urusan kominfo, statistik dan persandian yang transparan, akuntabel dan profesional	Indek RB Diskominfo	30,83	31,5	32	32,5	33	33,5	34

No.	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Persentase Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang disebarakan	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%
2	Meningkatnya penerapan e-Government	Presentase Peningkatan kematangan Indeks SPBE	30%	30%	38%	90%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya Penyediaan Data	Persentasi ketersediaan data statistik sektoral terintegrasi	0%	0%	20%	40%	60%	80%	100%
	Meningkatnya Pengamanan Informasi dan Persandian	Persentase Kasus keamanan informasi yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas dan Kinerja Diskominfo	3. nilai sakip Diskominfo 4. persentase penyerapan anggaran	3. 76,5 4. 80%	3. 78 4. 80%	2. 79 80%	3. 82 4. 82%	3. 83 4. 85%	3. 84 4. 87%	3. 85 4. 90%

BAB VIII

PENUTUP

Reviu Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah 2021-2026, merupakan pedoman penvapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2021. Dalam dokumen Rencana Strategis diuraikan sasaran – sasaran yang diprioritaskan untuk dicapai, infikator kinerja yang digunakan beserta target yang harus dicapai lima tahun yang akan datang, program-program, dan prediksi anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian masing-masing sasaran.

Beberapa hal masih perlu dilakukan untuk penyesuaian/perbaikan renstra ini sehingga reviu renstra secara periodik perlu dilakukan.

Barabai, 20 Oktober 2023

Kepala Dinas

Ir. H. AHMAD SYAHRANI, MT
Pembina Utama Muda
NIP 19660518 199303 1 006

LOGIC FRAME/RINTRA DI/AB KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2021 - 2025

MASALAH POKOK	MASALAH STRATEGIS	MASALAH	AKAR MASALAH	TUJUAN	INDIKATOR	MASALAH	INDIKATOR	STRATEGI	ACUAN NORMAS/KANUN	PROGRAM/FORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	INDIKATOR	KEMATAN	INDIKATOR	SUB KEMATAN	INDIKATOR	UNIT KERJA	
Belum optimalnya pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Kurangnyakes dan kualitas informasi publik	Belum optimalnya pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks SPIE	Meningkatnya penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Indeks Informasi dan Komunikasi Pemerintahan yang dijabarkan	Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi pemerintahan	Pengelolaan berita, isu publik, pendapat umum dan aduan masyarakat	PROGRAM/FORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presensi Pengantar media penyebaran informasi dan komunikasi	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Forum Informasi Publik Monitoring Opini dan Aspirasi Publik		
			Belum optimalnya pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik						Manajemen dan perencanaan media komunikasi publik					PANGKALAN KOMUNIKASI PERENCANAAN MEDIA KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik		
			Belum optimalnya pengelolaan media komunikasi publik						Manajemen dan perencanaan media komunikasi publik					PANGKALAN MANAJEMEN KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		
			Belum optimalnya kapasitas PPID						Manajemen dan perencanaan PPID					PANGKALAN MANAJEMEN LOKAL	Forum Informasi Publik Pelayanan Informasi Publik		
			Belum optimalnya kerjasama media						Manajemen dan perencanaan kerjasama media					LAYANAN RUMAH KUNYAS	Forum Informasi Publik		
			Belum optimalnya strategi pemerintah						Manajemen dan perencanaan strategi pemerintah					KEMAHIRAN BANGUN PEMANAJEMEN KEPENTINGAN	Forum Informasi Publik Dengan Pemanggu Kepentingan		
			Belum optimalnya Sumbataya komunikasi publik						Manajemen dan perencanaan Sumbataya komunikasi publik					PANGKALAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitas		
			Kurangnyasumber Pendukung Informal						Manajemen dan perencanaan Pendukung Informal					PANGKALAN INFORMASI DAN PRASARANA PENDUKUNG INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik Penukung Informasidan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Belum optimalnya penerapan e-Government	Belum optimalnya penerapan e-gov perangkat daerah	Belum optimalnya Penetalaaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Belum optimalnya penerapan e-Government	Belum optimalnya penerapan e-Government	Meningkatkan kelengkapan dan teta lisensi organisasi pemerintah daerah dalam pengembangan e-government	Ornansi Penetalaaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	PROGRAM/FORMASI INFORMATIKA	Manajemen dan perencanaan yang terintegrasi	Manajemen dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Manajemen dan perencanaan daerah yang menggunakan domain resmi	PANGKALAN INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
			Belum optimalnya Penetalaaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						Ornansi Penetalaaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Manajemen dan perencanaan daerah yang memanfaatkan aplikasi	PANGKALAN INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
			Belum optimalnya Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah						Pusat Data Pemerintahan Daerah					PANGKALAN PUSAT DATA PEMERINTAHAN DAERAH	Forum Informasi Publik Daerah yang Dikelola		
			Belum optimalnya Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah						Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah					PANGKALAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMERINTAHAN DAERAH	Forum Informasi Publik Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintahan Daerah		
			Belum optimalnya Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik					PANGKALAN APLIKASIDAN PROSES BISNIS PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	Forum Informasi Publik Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Diembangkan		
			Belum optimalnya Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informal dan Komunikasi Pemerintahan Daerah						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informal dan Komunikasi Pemerintahan Daerah					PANGKALAN SUMBER DAYA TEKNOLOGI INFORMASIDAN KOMUNIKASI PUBLIK	Forum Informasi Publik Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informal dan Komunikasi Pemerintahan Daerah		
Belum optimalnya pengelolaan Statistik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya statistik sektoral	Belum optimalnya statistik sektoral daerah	Kurangnyakes dan kualitas statistik sektoral	Meningkatkan pemantauan data statistik sektoral untuk pembangunan	Manajemen dan perencanaan statistik sektoral	Belum optimalnya pemantauan data statistik sektoral	Belum optimalnya pemantauan data statistik sektoral	Meningkatkan kelengkapan data statistik sektoral daerah	Manajemen dan perencanaan Statistik Sektoral	PROGRAM/FORMASI STATISTIKSEKTORAL	Manajemen dan perencanaan sektoral yang terbaharu	Manajemen dan perencanaan Statistik Sektoral	Manajemen dan perencanaan data sektoral	KONDISI STATISTIKSEKTORAL	Forum Informasi Publik Pengumpulan, Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		
			Kurangnyakes dan kualitas statistik sektoral						Manajemen dan perencanaan Statistik Sektoral					PANGKALAN STATISTIKSEKTORAL	Forum Informasi Publik yang Meningkatkan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi		
			Kurangnyakes dan kualitas statistik sektoral						Manajemen dan perencanaan Statistik Sektoral					PANGKALAN STATISTIKSEKTORAL	Forum Informasi Publik Statistik Sektoral yang Diminut		
Belum optimalnya pengelolaan Perencanaan dan Penyelenggaraan pemerintahan daerah	Belum optimalnya Pengamanan Informal dan Perencanaan	Belum optimalnya Pengamanan Informal dan Perencanaan	Belum optimalnya Pelaksanaan Keamanaan Informal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Meningkatkan pelaksanaan Pengamanan Informal dan Perencanaan	Manajemen dan perencanaan Pengamanan Informal dan Perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan Pengamanan Informal dan Perencanaan	Belum optimalnya pelaksanaan Pengamanan Informal dan Perencanaan	Meningkatkan pelaksanaan Pengamanan Informal dan Perencanaan	Manajemen dan perencanaan Pengamanan Informal dan Perencanaan	PROGRAM/FORMASI PENGAMANANINFORMASI	Manajemen dan perencanaan daerah menerapkan Keamanaan Informal	Manajemen dan perencanaan herandan Untuk Pengamanan Informal	Manajemen dan perencanaan daerah yang telah menggunakan sandi dan komunikasi antar PD	PANGKALAN PENGAMANANINFORMASIDAN PERENCANAAN	Forum Informasi Publik Keamanaan Informal Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

